

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN

NO : 900/0435/400.04



TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini.

RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, secara garis besar membahas tentang evaluasi kerja Kecamatan Sambutan pada tahun lalu (2020), sampai dengan perencanaan kerja tahun 2021. Kemudian, dibahas pula capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026 sampai dengan sejauh ini, dan tentunya perencanaan kerja Perubahan Kecamatan Sambutan pada tahun 2022 ini.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RENJA Perubahan tahun 2022 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, khususnya Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Sambutan ini.

Samarinda, 22 Juli 2022

Camat



Yosua Ladeu, S.STP,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Sambutan.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambutan	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Kecamatan Sambutan.....	68
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022	70
BAB IV PENUTUP	78



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peranan penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada 1 (satu) titik, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa, “*Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan mikro semua fungsi pemerintahan, yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuan, yang antara lain, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergisasi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah.

Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana dengan skala yang lebih spesifik. Pembangunan yang disusun, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *stakeholder* di daerah, perlu menjamin terlaksanannya pembangunan sesuai rencana, dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) lima Tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki RENJA yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA, dan mengacu kepada RKPD.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

Dalam perjalanannya, RENJA setiap instansi, termasuk Kecamatan Sambutan tentu mengalami perubahan, baik itu terkait pergeseran anggaran, maupun penambahan dan pengurangan anggaran, serta apabila terdapat perubahan-perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RENSTRA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Sambutan melakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RENJA tahun 2022.

Ranwal RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, tetap mengacu kepada RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2022-2026.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya masing-masing tidak lagi memiliki visi dan misi, visi dan misi setiap OPD sudah terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerahnya masing-masing, dimana hal ini dimaksudkan agar setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung penuh dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerahnya, disamping hal ini membatasi ego sektoral setiap OPD. Ketiadaan visi dan misi ini tentu juga terjadi pada setiap OPD di Kota Samarinda, tanpa terkecuali Kecamatan Sambutan. Singkatnya, yang menjadi visi dan misi Kecamatan Sambutan sudah terintegrasi dengan visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026 Adapun visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu : **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**.

Sebagai bentuk perwujudan visi di atas, maka disusunlah misi Walikota Samarinda tahun 2022-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

Ranwal RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan tahun 2022, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sambutan tahun 2022 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nonklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2022-2026
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda.
17. Peraturan Wali Kota Nomor 27 tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukthiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);Permendagri 81/2022
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 100/235/020



1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, yaitu memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Sambutan, beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sambutan, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.1. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Sambutan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sambutan, proses penyusunan Renja Kecamatan Sambutan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Sambutan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Sambutan, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah,



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Kecamatan Sambutan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sambutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Sambutan serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Sambutan

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan

Berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambutan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2022

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional /internasional seperti NSPK, SMP dan SDGs (Sustainable Development Goals);



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sambutan berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
 - 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022
- Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan serta penjelasan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan

Rancangan akhir Renja Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2022 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sambutan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2021 dan capaian RenstraKecamatan Sambutan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sambutan s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	-	-	-	-	84	-	-
7 1 2 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	8 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	8 Jenis Kegiatan	-	-
7 1 2 2 1 2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	5 Jenis Kegiatan	-	-
7 1 2 2 1 2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7 1 2 2 1 2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Makroman	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sambutan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	3					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65%	-	-	-	100 %	-	-

7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1221 Jenis Usulan	-	-	-	-	132 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	60 Jenis Usulan	-	-	-	-	19 Jenis Usulan	-	-

7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	36 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	162 Jenis Usulan	-	-	-	-	11 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	150 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	240 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-

Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan
 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
 Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022
 Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja
 Program dan Kegiatan Tahun 2020
 Target
 Realisasi
 Tingkat Realisasi (%)

Target
 Program
 dan
 Kegiatan
 (Renja
 OPD
 Tahun
 2021)

Perkiraan realisasi Capaian target
 Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
 Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan
 Tahun 2022
 Tingkat Capaian Realisasi Target
 Renstra (%)

1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	50 Jenis Usulan	-	-	-	-	19 Jenis Usulan	-	-

7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	45 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	135 Jenis Usulan	-	-	-	-	11 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	125 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	200 Jenis Usulan	-	-	-	-	12 Jenis Usulan	-	-
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	-	-	-	-	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Renstra SKP
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	9 dokumen	-	-	-	-	9 dokumen	-
5	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	-
5	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		

5	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-
5	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	-
5	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	70 Orang	-	-	-	-	12 bln	-
5	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	40 Orang	-	-	-	-	30 Orang	-
5	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tahun 2022
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	33 laporan	-	-	-	-	33 laporan	-
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	-	-	-	-	12 bln	-
7	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	50 buah	-	-	-	-	50 buah	-
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan re Renstra SKP
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	-
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	25 SPPD	-	-	-	-	25 SPPD	-
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	-
5	1	1	2	7	5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-
5	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Unit	-	-	-	-	50 Unit	-
5	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	228 Rekening	-
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tagihan jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	12 Bulan	-
5	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	12 Bukti Pembayaran	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan re Renstra SKP
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-
7	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	18 Unit	-	-	-	-	18 Unit	-
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-
7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin	31 Unit	-	-	-	-	31 Unit	-
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	12 Gedung	-	-	-	-	12 Gedung	-
7	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2020 dan tahun 2021 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021, total belanja sebesar Rp. 16.985.553.550,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 16.608.925.950,- dan Belanja Modal Rp. 376.627.600,- . Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan.
2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 26,86% atau Rp 5.428.581.768,-, untuk realisasi fisiknya mencapai 27,46%.
3. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2020 untuk belanja 92,48% atau Rp13.487.046.529,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 92,48%.
4. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun 2020, total belanja sebesar Rp. 14.131.702.200,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.949.875.000,- dan Belanja Langsung Rp.6.181.827.200,-. Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk anggaran 5 program dan 30 kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambutan.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Mutu Pelayanan Publik		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	100%	100%	84	84			84	84	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan		25,28%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sindang Sari	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		60,62%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Pulau Atas	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		61,90%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Makroman	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		63,21%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sungai Kapih	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		61,81%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sambutan	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		74,61%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui			100%	65%			100%	65%	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sindang Sari			19 Jenis Usulan	60 Jenis Usulan			19 Jenis Usulan	60 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Pulau Atas			12 Jenis Usulan	36 Jenis Usulan			12 Jenis Usulan	36 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Makroman			11 Jenis Usulan	162 Jenis Usulan			11 Jenis Usulan	162 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sungai Kapih			12 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan			12 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sambutan			12 Jenis Usulan	240 Jenis Usulan			12 Jenis Usulan	240 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Sindang sari			19 Jenis Usulan	50 Jenis Usulan			19 Jenis Usulan	50 Jenis Usulan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Pulau Atas			12 Jenis Usulan	45 Jenis Usulan			12 Jenis Usulan	45 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Makroman			11 Jenis Usulan	135 Jenis Usulan			11 Jenis Usulan	135 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Sungai Kapih			12 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan			12 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Sambutan			12 Jenis Usulan	200 Jenis usulan			12 Jenis Usulan	200 Jenis usulan	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan			100	83			100	83	
	- Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja			9	60			9	60	
			Jumlah dokumen perencanaan			5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah laporan evaluasi			4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
	- Laporan Administrasi Keuangan		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan			12 bulan	70 Orang			12 bulan	70 Orang	
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan			30 Orang	40 Orang			30 Orang	40 Orang	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah laporan			5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan			33 Laporan	33 Laporan			33 Laporan	33 Laporan	
			Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	
			Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	5 Jenis			12 bulan	5 Jenis	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai			110 Orang	110 Orang			110 Orang	110 Orang	
			Jumlah pakaian Dinas dan Kelengkapannya			105 Orang	110 Orang			105 Orang	110 Orang	
			Jumlah ASN yang didiklat			72 Orang	6 Orang			72 Orang	6 Orang	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah peralatan rumah tangga			50 Buah	50 Buah			50 Buah	50 Buah	
			Jumlah Bahan Logistik		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
			Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan			4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
			Jumlah SPPD		100%	25 SPPD	25 SPPD		100%	25 SPPD	25 SPPD	
	- Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Jumlah Mebel			50 Unit	50 Unit			50 Unit	50 Unit	
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan			1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	
	- Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Penyediaan Jasa			12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	
			Tagihan rekening jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik			228 rekening	36 Bukti Pembayaran			228 rekening	36 Bukti Pembayaran	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tagihan jasa perlegkapandan peralatan kantor			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	
			Tagihan jasa Pelayanan Umum			12 Bulan	12 Bukti Pembayaran			12 Bulan	12 Bukti Pembayaran	
	- Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Laporan Pemeliharaan			12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas			18 Unit	18 Unit			18 Unit	18 Unit	
			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional			1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	
			Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin			31 Unit	31 Unit			31 Unit	31 Unit	
			Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung			12 Gedung	12 Gedung			12 Gedung	12 Gedung	
			Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upayamendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal;dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

1. Camat

Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;

5. Pengelolaan urusan kehumasan, perpustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
2. Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian;
3. Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
4. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventari kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan

kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasayarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksnaakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidangkebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2016-2021.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program prioritas Kecamatan Sambutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Sambutan serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Sambutan yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Sambutan terhadap dokumen perencanaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sambutan merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Sambutan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain
2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan
5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Sambutan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sambutan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Sambutan berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Persen	9.505.763.000	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Persen	Isi sesuai RKPD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	9.098.745.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	PTT serta Iuran BPJS yang dibayarkan	Bulan	407.018.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	PTT serta Iuran BPJS yang dibayarkan	Bulan		
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Dokumen hasil perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	75.000.000		Kota Samarinda		12 Bulan		

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP	Persen	75.000.000		Kota Samarinda		12 Bulan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	Persen	151.967.160	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	12 Bulan		
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7.000.000	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	360.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Tersedianya alat kantor	Jenis	8.500.000	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Tersedianya alat kantor	Jenis	25.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.673.160	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.884.375	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Persen	49.794.000	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Persen	205.785.300	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	351.905.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	444.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran	212.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran	182.400.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Samarinda	Tersedianya jasa penyediaan peralatan	Jenis	139.905.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Kota Samarinda	Tersedianya jasa penyediaan peralatan dan	Jenis	80.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Samarinda	Persentase jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Persen	58.681.250	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Samarinda	Persentase jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Persen	58.681.250	
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Persen	30.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Persen	30.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan kantor	Persen	3.900.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan kantor	Persen	3.900.000	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	1.416.692.140	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	1.416.692.140	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat	jenis	916.716.625	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat	jenis	916.716.625	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kecamatan		kecamatan			kecamatan		kecamatan			
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Dokumen	99.999.440	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Dokumen	99.999.440	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	jenis	99.999.175	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	jenis	99.999.175	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	jenis	99.999.100	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	jenis	99.999.100	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Jenis	100.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Jenis	100.000.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan	Jenis	99.977.800	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan	Jenis	99.977.800	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan Pulau Atas		pemerintahan di Kelurahan								
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	Persen	5.391.645.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	Persen	5.391.645.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jenis	765.985.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	765.985.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jenis	1.070.572.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jenis	1.070.572.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	669.868.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	669.868.000	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Makroman		Kelurahan					Kelurahan Bukuan			
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sindang sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jenis	633.325.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sindang sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bantuas	Jenis	633.325.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jenis	477.010.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jenis	477.010.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	550.547.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	550.547.000	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	817.061.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis	817.061.000	
--	---	----------------	--	-------	-------------	---	----------------	--	-------	-------------	--

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Handil Bakti					Kelurahan Handil Bakti			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	670.035.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	670.035.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	449.074.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	449.074.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	287.668.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	287.668.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Sambutan diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samainda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang

bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2021.

Tabel 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sambutan

No	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volume	Pagu
1	2	3	4	Rp 5
KELURAHAN SAMBUTAN				
1	Pembangunan Kantor Kelurahan Sambutan	RT. 19	P. 30 M x L 15 M	Rp 3.000.000.000
2	Semenisasi Gg. H. Azis 2	RT. 19	P. 300 M x L 3 M x 20 CM	Rp 300.000.000
3	Pematangan Lahan Kuburan	RT. 03	8 Ha	Rp 1.500.000.000
4	Gapura Masuk Kel Sambutan	RT. 08	T 7 M x L 12 M	Rp 1.500.000.000
5	Peningkatan Jalan Padat Karya	RT. 20	P. 800 M x L 6 x T. 20	Rp 20.000.000.000
KELURAHAN SUNGAI KAPIH				
6	Semenisasi / Pengecoran jalan	Gg.Abadi I Rt.03	4 x 50 m	Rp 100.000.000
7	Drainase / Parit	RT.15	1000 m	Rp 500.000.000
8	Jembatan jalan poros	Jl.Kehewan RT.08	6 x 8 m	
9	Semenisasi	Jl.HM.Saleh Arsyad gg.Langsat RT.07	175 m x 4 m	Rp 1.000.000.000
10	Renovasi Musholla Al-Falah	RT 14		
KELURAHAN MAKROMAN				
11	Pembangunan Kantor Kelurahan Makroman	Jl Kelurahan RT 06	10x92	Rp 2.500.000.000
12	Pelebaran Jembatan/Renovasi	Jl. Purwobinangun RT.10	10m x 8m	
13	Semenisasi Bahu Jalan	Jl Pembangunan	1500m x 1m	

		RT 18		
14	Semenisasi	Jl Makam RT 23	500m x 4m	
15	Semenisasi	Jl Penangkaran Buaya 2 RT 14	600x4m	
KELURAHAN SINDANG SARI				
16	Pembangunan Kantor Kel.Sindang Sari	Jl. Karya Bakti RT.09	1 Unit	Rp 3.500.000.000
17	Semenisasi Jalan	Jl.Klorofil RT.02	300 m x 3 m x 20 cm	Rp 900.000.000
18	Semenisasi Jalan	Jl. Taruna Bakti RT 07, 06, 05, 10	665 m x 1 m	Rp 845.000.000
19	Semenisasi Jalan	Jl.S.Manggis RT.01	3000 m x 8 m x 20 cm	Rp 19.000.000.000
20	Perbaikan Jembatan	Jl.Pasundan RT.01	4 m x 3 m	Rp 100.000.000
KELURAHAN PULAU ATAS				
21	Pembangunan Gedung/Balai Pertemuan	RT 02	20 m x 10 m x 200 m ²	Rp 2.000.000.000
22	Semenisasi Jalan Olah Bebaya	RT 02, RT 03, RT 09	3600 m x 5 m x 18000 m ²	Rp 3.000.000.000
23	Semenisasi Lanjutan Sei Lais	RT 04	500 m x 4 m	Rp 600.000.000
24	Semenisasi Jalan Utama Perum KORPRI	RT 08	4000 m x 5 m	Rp 3.500.000.000
25	Semenisasi dan drainase Gang Tersebar 10 titik	Kelurahan Pulau Atas	2000 m x 4 m x 8000m ²	Rp 2.300.000.000
KECAMATAN SAMBUTAN				
26	Perbaikan jalan menuju kantor kecamatan sambutan	Kel Sambutan RT 10	563 m x 4 m	
27	Perbaikan turap kantor kecamatan sambutan	Kel Sambutan RT 10	90 m x 3,5 m	
28	Renovasi Kantor kecamatan sambutan	Kel Sambutan RT 10	154 m ²	
29	Renovasi tempat aula Kecamatan sambutan	Kel Sambutan RT 10	15 m x 8 m	
30	Renov tempat parkir Kantor kecamatan sambutan	Kel Sambutan RT 10	8 m x 4 m	

Sosial Budaya

No	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volume	Pagu
----	--------------------	--------	--------	------

1	5	7	8	Rp	9
KELURAHAN SAMBUTAN					
1	Renovasi Langgar At-Tukizzah	RT. 18	P. 20 M x L 10 M	Rp	300.000.000
2	Peralatan Gotong Royong	RT.06	1 PAKET	Rp	5.000.000
3	Perlengkapan Hadrah Al -Hijrah	RT. 33	1 PAKET	Rp	15.000.000
4	Perlengkapan Habsy Masjid As-Shomad	RT. 06	1 PAKET	Rp	10.000.000
5	Sarana Bermain/ Lapangan Olah Raga	RT. 37	1 PAKET	Rp	5.000.000
KELURAHAN SUNGAI KAPIH					
6	Pembuatan Pendopo dan Pagar Makam	Jl. Kehewanan RT 08			
7	Ambulace	RT.24			
8	Pembuatan WC Posyandu Angsoka	Gg,angsoka IV Rt.13			
9	Teras dan pagar Posyandu Puri	RT.02	P = 3 m, L = 5,5 m	Rp	30.000.000
10	Mesin pompa air/selang	RT.17	1 buah (75 m)	Rp	100.000.000
KELURAHAN MAKROMAN					
11	Alat Olahraga (Tenis Meja, Bola Kaki dan Seragam)	Jl. Kelurahan RT 06	2bh dan 60 Pcs		
12	Mesin Pemotong Rumput Lapangan	Jl. Kelurahan RT 06	6 Unit		
13	Perlengkapan Kuda Kepang	Jl Tridarma dan Jln Sukorejo	2 Kelompok	Rp	60.000.000
14	Peralatan Habsi	8 Kelompok Habsi Makroman	8 Unit		
15	Tempat Pembuangan Sampah	Kel. Makroman	3 Paket		
KELURAHAN SINDANG SARI					
16	Pelatihan Publik Speaking (PIK-Remaja)	Jl. Karya Bakti RT.07	1 PAKET	Rp	6.050.000
17	Bantuan Alat Habsy	RT.04,05,07,10 (4 Kelompok)	4 SET	Rp	120.000.000
18	Bantuan Alat Musik Tradisional/Kuda Kepang	RT.04,08 (2 Kelompok Cahyo Budoyo, Banyumasan)	2 SET	Rp	100.000.000
19	Pelatihan Merias Jilbab/Sanggul (Tata Rias)	Jl. Kelurahan RT 06	20 ORANG	Rp	50.000.000

20	Pelatihan Memotong Rambut	Jl. Kelurahan RT 06	20 ORANG	Rp 50.000.000
KELURAHAN PULAU ATAS				
21	Pembuatan Lapangan Badminton	RT 02 dan RT 03	20 m x 5 m x 100m ²	Rp 100.000.000
22	Rehab Lantai Masjid Al Mukarromah	RT 02	100 m x 100 m x 10000 m ²	Rp 150.000.000
23	Bantuan Alat Bermain PAUD	RT 02		Rp 50.000.000

Ekonomi

No	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volume	Pagu
1	5	7	8	Rp 9
KELURAHAN SAMBUTAN				
1	Bantuan modal usaha lunak warung kecil	RT.06	10 BH	Rp 25.000.000
2	Budidaya Ikan Lele Lingkungan	RT.25	LS	Rp 54.233.900
3	Hidroponik	RT. 30	10 unit	Rp 50.000.000
4	Pelatihan Menjahit	RT. 19	25 Org	Rp 50.000.000
5	Pelatihan Daur Ulang Sampah	RT. 19	25 Org	Rp 100.000.000
KELURAHAN SUNGAI KAPIH				
6	Pelatihan menjahit	KEL. SUNGAI KAPIH		
7	Mesin jahit	KEL. SUNGAI KAPIH	2 unit	
8	Mesin Obras	KEL. SUNGAI KAPIH	2 unit	
9	Mesin Neci	KEL. SUNGAI KAPIH	2 unit	
10	Etalase untuk pelaku usaha UMKM	KEL. SUNGAI KAPIH	4 buah	Rp 8.000.000
KELURAHAN MAKROMAN				
11	Mesin Panen Padi	Jln Kalam Luas RT 13	1 Unit	
12	Hand Tracktor	Jl. Purwobinangun RT 14	1 Unit	

13	Perlengkapan alat-alat Posyandu	Jl. Purwobinangun RT 14	1 PAKET	
14	Pelatihan Kewirausahaan berbasis online dan kemitraan	Kel. Makroman		
15	Pelatihan Usaha Industri Kecil	Kel. Makroman		
KELURAHAN SINDANG SARI				
16	Mesin Penggilingan Pakan Ikan	Jl.Pasundan RT.01	1 PAKET	Rp 100.000.000
17	Bantuan Ternak Kambing	RT.04,07,09 (3 Kelompok)	15 EKOR	Rp 75.000.000
18	Bantuan hewan (Sapi)	2 Kelompok (Karya Tani, Sumber Abadi)	10 EKOR	
19	Pengadaan Alat dan Pelatihan Menjahit	Jl.Karya Bakti RT.09	2 PAKET	Rp 125.000.000
20	Timbangan Hibrid 300 Kg	Jl.Dahlia RT.09	1 PAKET	Rp 10.000.000
KELURAHAN PULAU ATAS				
21	Bantuan Alat Kelompok Tani	Kelurahan Pulau Atas		Rp 150.000.000
22	Bantuan Bibit Tanaman Produktif	Kelurahan Pulau Atas		Rp 50.000.000
23	Bantuan Bibit Perikanan	Kelurahan Pulau Atas		Rp 100.000.000

Tabel 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Ketua RT Se Kecamatan Sambutan Tahun 2022

KELURAHAN SAMBUTAN

<i>NO</i>	<i>RT</i>	<i>SAPRAS</i>	<i>PEMBERDAYAAN</i>
1	1	78.000.000	22.000.000
2	2	75.125.000	24.875.000
3	3	60.000.000	40.000.000
4	4	82.000.000	18.000.000
5	5	67.500.000	32.500.000
6	6	70.500.000	29.500.000

7	7	52.350.000	47.650.000
8	8	26.000.000	74.000.000
9	9	67.000.000	33.000.000
10	10	63.400.000	36.600.000
11	11	72.300.000	27.700.000
12	12	83.000.000	17.000.000
13	13	88.000.000	12.000.000
14	14	62.500.000	37.500.000
15	15	63.000.000	37.000.000
16	16	78.000.000	22.000.000
17	17	80.500.000	19.500.000
18	18	79.000.000	21.000.000
19	19	63.490.000	36.510.000
20	20	65.900.000	34.100.000
21	21	88.000.000	12.000.000
22	22	2.000.000	98.000.000
23	23	78.400.000	21.600.000
24	24	33.880.000	66.120.000
25	25	88.000.000	12.000.000
26	26	87.000.000	13.000.000
27	27	50.000.000	50.000.000
28	28	57.000.000	43.000.000
29	29	16.250.000	83.750.000
30	30	42.000.000	58.000.000
31	31	52.450.000	47.550.000
32	32	40.000.000	60.000.000
33	33	79.000.000	21.000.000
34	34	66.000.000	34.000.000
35	35	62.378.000	37.622.000
36	36	26.000.000	74.000.000
37	37	80.500.000	19.500.000
38	38	72.000.000	28.000.000
39	39	55.000.000	45.000.000
40	40	60.000.000	40.000.000
JUMLAH		2.513.423.000	1.486.577.000

KELURAHAN PULAU ATAS

NO	RT	SAPRAS	PEMBERDAYAAN
1	1	13.400.000,00	86.600.000
2	2	88.000.000,00	12.000.000

3	3	45.000.000,00	55.000.000
4	4	44.850.000,00	55.150.000,00
5	5	49.000.000,00	51.000.000,00
6	6	47.600.000,00	52.400.000,00
7	7	23.000.000,00	77.000.000,00
8	8	-	100.000.000,00
9	9	-	100.000.000,00
Jumlah		310.850.000,00	589.150.000

KELURAHAN SINDANG SARI

No.	Jumlah RT	Sarpras	Pemberdayaan
1	RT.01	52.325.000	47.675.000
2	RT.02	56.000.000	44.000.000
3	RT.03	65.106.000	34.894.000
4	RT.04	73.700.000	26.300.000
5	RT.05	78.360.000	21.640.000
6	RT.06	48.172.000	51.828.000
7	RT.07	57.800.000	42.200.000
8	RT.08	59.900.000	40.100.000
9	RT.09	40.380.000	59.620.000
10	RT.10	56.097.000	43.903.000
JUMLAH		587.840.000	412.160.000

KELURAHAN SUNGAI KAPIH

NO	RT	SAPRAS	PEMBERDAYAAN
1	1	85.986.800,00	10.000.000
2	2	25.086.800,00	68.400.000
3	3	67.746.800,00	28.740.000
4	4	8.486.800,00	88.000.000,00
5	5	76.486.800,00	20.000.000,00
6	6	93.486.800,00	-
7	7	96.486.800,00	-
8	8	84.486.800,00	12.000.000,00
9	9	53.486.800,00	43.000.000,00
10	10	76.446.800,00	20.040.000,00
11	11	60.086.800,00	36.400.000,00
12	12	96.486.800,00	-
13	13	77.486.800,00	19.000.000,00
14	14	73.486.800,00	17.040.000,00

15	15	96.486.800,00	-
16	16	48.086.800,00	29.740.000,00
17	17	71.486.800,00	25.000.000,00
18	18	96.486.800,00	-
19	19	63.486.800,00	33.000.000,00
20	20	96.486.800,00	-
21	21	43.486.800,00	52.200.000,00
22	22	68.286.800,00	28.200.000,00
23	23	77.286.800,00	19.450.000,00
24	24	61.736.800,00	36.000.000,00
25	25	8.486.800,00	88.000.000,00
JUMLAH		1.707.540.000,00	674.210.000

KELURAHAN MAKROMAN

NO	RT	SAPRAS	PEMBERDAYAAN
1	1	Rp 63.640.000,00	Rp 36.556.000,00
2	2	Rp 60.000.000,00	Rp 40.000.000,00
3	3	Rp 62.300.000,00	Rp 37.700.000,00
4	4	Rp 66.501.000,00	Rp 33.255.000,00
5	5	Rp 45.000.100,00	Rp 55.000.000,00
6	6	Rp 55.600.000,00	Rp 44.400.000,00
7	7	Rp 52.031.000,00	Rp 48.000.000,00
8	8	Rp 88.000.000,00	Rp 12.000.000,00
9	9	Rp 63.300.000,00	Rp 36.700.000,00
10	10	Rp 57.793.000,00	Rp 42.198.000,00
11	11	Rp 61.000.000,00	Rp 39.000.000,00
12	12	Rp 65.000.000,00	Rp 46.000.000,00
13	13	Rp 49.200.000,00	Rp 50.800.000,00
14	14	Rp 78.558.000,00	Rp 24.000.000,00
15	15	Rp 39.400.000,00	Rp 28.820.000,00
16	16	Rp 60.000.000,00	Rp 40.000.000,00
17	17	Rp 71.400.000,00	Rp 28.600.000,00
18	18	Rp 88.000.000,00	Rp 12.000.000,00
19	19	Rp 58.000.000,00	Rp 42.000.000,00
20	20	Rp 36.760.000,00	Rp 63.240.000,00
21	21	Rp 63.700.000,00	Rp 35.800.000,00
22	22	Rp 40.200.000,00	Rp 59.800.000,00
23	23	Rp 55.650.000,00	Rp 49.500.000,00
24	24	Rp 69.600.000,00	Rp 18.000.000,00
25	25	Rp 77.360.000,00	Rp 22.640.000,00
26	26	Rp 15.000.000,00	Rp 85.000.000,00
27	27	Rp 73.375.000,00	Rp 26.625.000,00

JUMLAH	Rp 1.616.368.100,00	Rp 1.057.634.000,00
---------------	----------------------------	----------------------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan. Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan. Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.



Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- b. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
- d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- h. Pencapaian MDG's dan;
- i. Pencapaian MP3EI.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambutan

Renja Kecamatan Sambutan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021–2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sambutan. Misi adalah strategi, tindakan, atau berbagai tahapan yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapat dan berhasil dengan baik.

Misi Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambutan adalah Renstra Kecamatan Sambutan adalah Misi 3 (tiga) yaitu ;

“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”



Strategi untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan melalui kebijakan antara lain :

1. Mengoptimalkan akses pengaduan masyarakat melalui kotak suara, media social dan pengaduan langsung kepada aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur melalui efisisensi pelayanan
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis
4. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang representative
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan HBS dan PHBS
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan kegiatan monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanganan

Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sambutan terkait denganmisi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-202 terutama misi ketiga yaitu:

1. Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sambutan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran kecamatan Sambutan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat



3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban" maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sambutan tahun 2022 terdiri dari 3 Program dan 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Secara garis besar, uraian program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan tahun 2022, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan tahun 2022 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2022.

Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan Kecamatan Sambutan, tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*), untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sambutan.

RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2022 ini, disusun dalam konsep sederhana, dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2022, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di Kecamatan Sambutan, serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Samarinda, 22 Juli 2022

Camat Sambutan

Yosda Laden, S.STP,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003